

PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN PENDEKATAN KLASTER DI SENTRA INDUSTRI TENUN IKAT KOTA KEDIRI

Mochamad Muchson

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nisantara PGRI Kediri,
mochamad.muchson@yahoo.co.id,

ABSTRAK

Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menetapkan sentra UMKM sebagai titik masuk (entry point). Untuk mengembangkan sentra ini melalui pendekatan klaster. Klaster adalah kerja sama internal dan kerja sama eksternal. Pendekatan klaster ini perlu didukung infrastruktur. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bentuk kerja sama internal, kerja sama eksternal dan infrastruktur. Metode penelitian menggunakan format desain deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk kerja sama internal adalah kerja sama produksi yaitu joint production atau produksi bersama, sub produksi dan pengadaan bahan baku. Kerja sama joint production saat mendapat pesanan dalam jumlah besar dan tidak mampu melakukan produksi sendiri sehingga dibagi bersama dengan anggota sentra yang lain. Kerja sama subproduksi saat men-sub kan produksinya ke pihak lain. Kerja sama pengadaan bahan baku saat ada pesanan dalam jumlah besar sehingga memesan bahan baku bersama-sama. Bentuk kerja sama eksternal dengan Perbankan, Lembaga Keuangan Mikro, Perguruan Tinggi, Pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Kerja sama dengan perbankan saat membutuhkan modal untuk investasi. Kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro saat membutuhkan modal kerja. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi saat menginovasi peralatan (Alat Tenun Bukan Mesin-ATBM). Kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi dan UMKM) saat ada pameran baik lokal, regional maupun nasional. Kerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk fasilitasi studi banding dan pelatihan. Dukungan infrastruktur adalah kecukupan daya listrik, sarana transportasi, telekomunikasi dan sarana air bersih. Kecukupan daya listrik untuk pengadaan air bersih, penerangan ruang produksi. Sarana transportasi untuk transportasi pengadaan bahan baku, pengiriman produk jadi. Sarana telekomunikasi untuk komunikasi bisnis. Sarana air bersih untuk pewarnaan saat proses produksi.

Kata kunci: *Pemberdayaan, UMKM, Klaster, kerja sama, infrastruktur.*

PENDAHULUAN

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah tidak perlu diragukan lagi. Sampai saat ini total pelaku UMKM mencapai 99,99% dari total pelaku ekonomi. Sumbangan terhadap PDB nasional mencapai 55% dan mampu menyerap

tenaga kerja sebesar 97%. Dari data ini menunjukkan bahwa UMKM mampu menjadi motor penggerak roda perekonomian masyarakat, meningkatkan produksi barang dan jasa dan penyediaan lapangan kerja.

Kontribusi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini perlu terus ditingkatkan melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah memberi daya atau kekuatan terhadap UMKM terutama masalah-masalah klasik yang dihadapi seperti masalah permodalan, pemasaran, inovasi, *networking* dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan ini UMKM akan mempunyai akses terhadap masalah-masalah tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

Salah satu pendekatan pemberdayaan yang direkomendasi oleh kajian Kementerian Koperasi dan UMKM adalah melalui pengembangan sentra. Ada beberapa alasan mengapa pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menetapkan sentra UMKM sebagai titik masuk (*entry point*): pertama adalah karakteristik UMKM yang memiliki heterogenitas yang tinggi terhadap berbagai aspek bisnis mengimplikasikan bahwa generalisasi kebijakan akan sulit diwujudkan untuk pengembangan UMKM. Kedua disamping kebijakan individual sulit dilakukan karena keterbatasan sumber daya yang dihadapi. Untuk itu pada tahap awal

pengembangan UMKM ditempuh melalui pengembangan sentra bisnis.

Ada beberapa alasan pemberdayaan UMKM melalui pengembangan sentra bisnis. Pertama adalah memberikan layanan kepada UMKM secara lebih fokus, kolektif dan efisien karena dengan sumber daya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UMKM yang lebih luas. Kedua pendekatan ini juga mempunyai efektivitas yang tinggi karena jelas sasarannya dan unit usaha yang ada pada sentra umumnya dicirikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang hampir sama seperti permodalan, pemasaran, inovasi, *networking* dan lain-lain. Ketiga sentra-sentra bisnis akan menjadi titik pertumbuhan (*growth point*) di daerahnya sehingga mampu mendukung upaya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah.

Salah satu pendekatan dalam rangka mengembangkan sentra adalah melalui pendekatan klaster. “Dalam perkembangannya ketika klaster menghasilkan praktek terbaik pengembangan industri di dunia, seperti yang terjadi pada klaster tertua industri galangan kapal di Norwegia,

maka kluster juga diterima sebagai pengertian pendekatan pengembangan industri” (UNCTAD, 2001) dalam (Soetrisno, 2009).

“Untuk meningkatkan daya saing dari UMKM pendekatan strateginya yang tepat adalah melalui *clustering* yang berarti program utama peningkatan daya saing UMKM adalah program pengembangan kluster-kluster (atau sentra-sentra) UMKM” (Tambunan, 2009:109).

Kluster adalah “hubungan kerja sama internal antar perusahaan di dalam sentra dan hubungan kerja sama eksternal antara perusahaan di dalam sentra dengan pelaku usaha luar misalnya usaha besar, bank, *Business Development Service* (BDS), dan lain-lain” (Ceglie dan Dini, 1999:2) dalam (Tambunan, 2006:5).

Terdapat tiga keuntungan utama dari pengembangan UMKM berdasarkan *clustering* sebagai berikut: Pertama, UMKM lebih mudah mengatasi semua kekurangan/hambatan dalam segala aspek bisnis mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi dan pemasaran, pendanaan, perbaikan mesin dan lain-lain,

dibandingkan jika UMKM beroperasi sendiri-sendiri. UMKM di dalam sebuah kluster akan menikmati apa yang dimaksud dengan “keuntungan ekonomi *aglomerasi*”. Kedua, lebih efisien dan efektif dalam pemberian bantuan atau kerja sama antara UKM dan pihak lain, misalnya, Usaha Besar (UB) dalam kegiatan *subcontracting*, perbankan dalam penyaluran kredit, eksportir, pedagang atau distributor dalam pemasaran. Ketiga, proses peralihan teknologi/pengetahuan dari sumber luar (misalnya dari perusahaan multinasional/MNCs) ke UMKM dan penyebarannya antara sesama UMKM lebih gampang, lebih efisien dan lebih efektif di dalam sebuah kluster dibandingkan jika unit-unit UMKM sangat terpecah lokasinya satu dari lainnya. Ini artinya juga bahwa inovasi lebih mudah terjadi di dalam sebuah kluster (Tambunan, 2009:109).

Kajian Kementerian Koperasi dan UKM (2005:4) tentang persyaratan dasar sebuah kluster agar dapat berkembang secara sehat diantaranya adalah adanya infrastruktur, jaringan pasar dan ketersediaan lembaga keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu terus diberdayakan. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan menetapkan sentra UMKM sebagai titik masuk (*entry point*) dengan dasar pemikiran dapat memberikan layanan secara lebih fokus, kolektif dan efisien karena dengan sumber daya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UMKM yang lebih luas. Lebih lanjut untuk mengembangkan sentra UMKM ini melalui pendekatan klaster.

Klaster adalah kerja sama internal antar pelaku UMKM di dalam sentra, kerja sama eksternal antar pelaku UMKM di dalam sentra dengan pelaku bisnis di luar sentra dan adanya dukungan infrastruktur yang memadai di lokasi sentra. Dengan adanya pemberdayaan melalui pendekatan klaster ini maka UMKM dapat mengatasi masalah permodalan, pemasaran, inovasi, *networking* dan lain-lain sehingga berdaya saing dan mampu

meningkatkan kinerjanya baik kinerja keuangan maupun non keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kerja sama internal, kerja sama eksternal dan infrastruktur di Sentra Industri Tenun Ikat Kota Kediri.

Rencana pemecahan masalah adalah 1) memberi rekomendasi untuk meningkatkan intensitas kerja sama internal, kerja sama eksternal dan dukungan infrastruktur, 2) memberi rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antar pelaku pemberdayaan terutama pihak eksternal agar tidak tumpang tindih dalam memberikan pemberdayaan sehingga lebih efektif dan efisien.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) merupakan implikasi dari UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi paradigma dan pendekatan pembangunan juga mengalami perubahan. Pendekatan pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini menekankan pada perencanaan dari bawah (*bottom up*), partisipatif, memberdayakan masyarakat dan berkelanjutan serta memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku pembangunan tetapi juga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Menurut definisinya pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'ood, 1990 dalam Mardikanto, 2010:32).

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan hidupnya (Mardikanto, 2010:34).

Sementara itu Tiyanto, *et al* (2006:98) yang mengutip Ife (1995) memaparkan prinsip pengembangan masyarakat diantaranya adalah pemberdayaan (*empowerment*) adalah “membantu” komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan komunitas.

Dari berbagai pengertian tersebut disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) dan penguatan (*strengthening*) dalam bentuk sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas

meningkat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

- a) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) menjelaskan pengertian usaha kecil menengah sebagai berikut: Usaha kecil adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, usaha menengah adalah entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s/d 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki

penjualan tahunan lebih besar Rp 1.000.000.000 s/d Rp 50.000.000.000.

- b) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s/d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s/d 99 orang.
- c) UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah-UMKM menyebutkan:
 - 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
 - 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

- bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- d) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- e) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- f) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Pengertian Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) dan penguatan (*strengthening*) kepada UMKM dalam bentuk sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas meningkat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya (kinerjanya).

Pengertian Pemberdayaan dengan Pendekatan Klaster

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 23/PER/M. MUKM/XI/2005 tentang Perubahan atas surat keputusan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan kluster adalah Jaringan Industri (Industri Inti yang menjadi fokus perhatian, Industri Pemasok bahan baku, bahan pembantu dan asesor, dan Industri Terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan industri inti), pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi, Institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan) serta pembeli, yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.

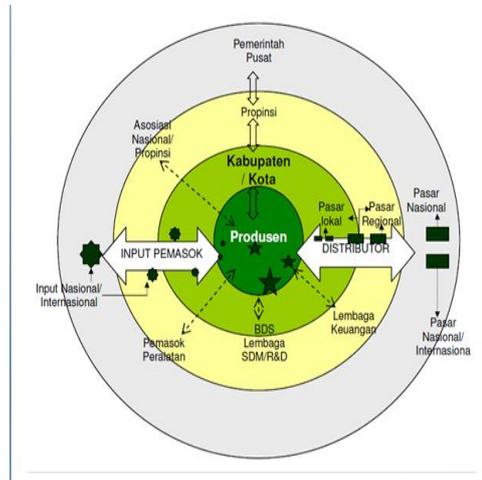
Kluster Bisnis adalah Kluster dimana bisnis Sentra UKM Unggulan telah menjadi bagian integral industri inti, industri pemasok, dan atau industri terkait.

Kluster sebagai kelompok kegiatan yang terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, yang dalam kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung (Lestari, 2006:10).

Kluster industri adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah. Kelompok industri spesifik tersebut merupakan jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (biasanya disebut dengan industri inti/*core industries* - yang menjadi "fokus perhatian," industri pendukungnya/*supporting industries*, dan industri terkait/*related industries*), pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/ teknologi (termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangyasa), institusi yang berperan menjembatani/*bridging institutions* (misalnya broker dan konsultan), serta pembeli, yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai (*value adding production chain*) (Taufik, 2013:2).

Dari beberapa pengertian tersebut disimpulkan bahwa kluster adalah industri inti, industri pendukung, industri terkait dan institusi yang mensupport teknologi, broker dan konsultan serta pembeli yang merupakan jejaring untuk proses

peningkatan nilai. Apabila digambarkan pengertian kluster tersebut adalah sebagai berikut.



Sumber: Lestari (2008)

Gambar 1: Kluster adalah industri inti, industri pendukung, industri terkait

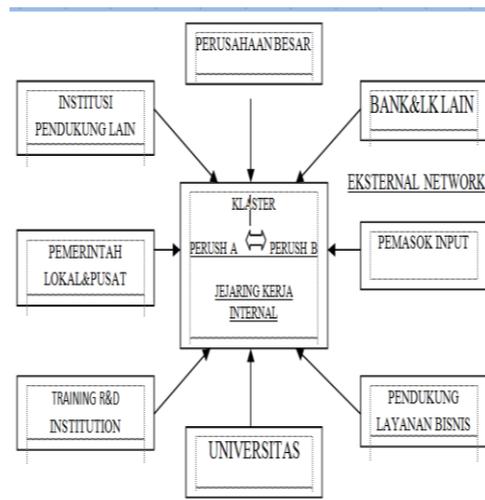
Kajian Penelitian Terdahulu tentang Kluster

Kluster: *Development of small-and medium-scale industry clusters in Indonesia* (Tambunan, 2006).

Penelitian ini dilatarbelakangi dua pertanyaan pokok yaitu pertama, apa faktor-faktor kritis yang mendukung pengembangan kluster UKM? Kedua, apa kebijakan yang berkontribusi bagi dinamika kluster UKM di Indonesia.

Tambunan (2000:10) yang mengutip Ceglie dan Dini (1999:2) menjelaskan bahwa kluster adalah hubungan kerja

sama internal antar pelaku usaha di dalam sebuah sentra dan kerja sama eksternal antar pelaku usaha di dalam sentra dengan pihak di luar sentra. Kerja sama internal dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama produksi, kerja sama pemasok bahan baku, kerja sama pemasaran, kerja sama pameran, kerja sama inovasi dan lain-lain. Kerja sama eksternal dapat dilakukan dengan perbankan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan lain-lain. Dengan adanya kerja sama perusahaan secara kolektif dapat mencapai skala ekonomi diluar pencapaian perusahaan secara perorangan. Demikian pula kerja sama akan menjadi wahana untuk belajar bersama, saling berbagi informasi dan inovasi. Apabila digambarkan pengertian tersebut tampak sebagai berikut.



Sumber: (Ceglie dan Dini, 1999:2)
dalam (Tambunan, 2006:5)

Gambar 2: Sebuah ilustrasi dalam jejaring kerja internal dan eksternal.

“Jejaring kerja sebuah klaster”

Jadi faktor-faktor kritis untuk pengembangan sebuah klaster adalah adanya kerja sama internal dan kerja sama eksternal. Sedangkan kebijakan yang berkontribusi pada dinamika klaster dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Penumbuhan iklim usaha dalam bentuk perundang-undangan dan kebijakan sehingga memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.

Dari berbagai pustaka dan kajian penelitian terdahulu disimpulkan bahwa klaster adalah kerja sama internal antar pelaku usaha di dalam sebuah sentra dan kerja sama eksternal antara pelaku usaha di dalam sebuah sentra dengan pihak luar sentra.

Sedangkan kajian Kementerian Koperasi dan UKM (2005:4) tentang persyaratan dasar sebuah klaster agar dapat berkembang secara sehat adalah sebagai berikut :

- a. Dalam setiap sentra yang akan ditumbuhkan sebagai klaster harus memiliki satu usaha sejenis yang prospek pasarnya jelas. Terdapat 30 - 50 unit usaha kecil yang melakukan kegiatan sejenis.
- b. Omzet dari keseluruhan unit usaha dalam klaster tersebut paling sedikit Rp. 500 juta,-/bulan.
- c. Telah terjadi sentuhan teknologi yang memungkinkan tercapainya peningkatan produktivitas.

- d. Persyaratan lain yang berkaitan dengan infrastruktur, jaringan pasar, ketersediaan lembaga keuangan dan lain-lain merupakan syarat tambahan yang menyediakan daya tarik klaster bersangkutan melalui jaringan informasi.

Dari berbagai pustaka dan kajian penelitian terdahulu disimpulkan bahwa klaster adalah sentra yang telah berkembang yang melaksanakan kerja sama internal antar pelaku usaha di dalam sebuah sentra dan kerja sama eksternal antara pelaku usaha di dalam sebuah sentra dengan pihak luar sentra dan adanya dukungan infrastruktur yang memadai di lokasi sentra. Apabila digambarkan pengertian klaster tersebut tampak sebagai berikut.



Sumber: diolah dari berbagai pustaka dan penelitian terdahulu

Gambar 3: Klaster adalah kerja sama internal, kerja sama eksternal dan infrastruktur

Jadi pemberdayaan UMKM dengan pendekatan klaster adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) dan penguatan (*strengthening*) kepada UMKM dalam bentuk kerja sama internal, kerja sama eksternal dan penyediaan infrastruktur yang berupa akses sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas meningkat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya (kinerjanya).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Format desain dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif dimana teori masih digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian studi kasus yaitu memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena sehingga kedalaman data dan

eksplorasi menjadi pertimbangan dalam desain penelitian ini.

Bungin (2009:68) menjelaskan penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif (yang terlalu positivisme), serta juga bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Bungin (2009:145) menjelaskan tahapan penelitian kualitatif juga adalah tahapan analisis kualitatif, dengan demikian maka tahapan-tahapan analisis itu juga adalah yang dilaksanakan peneliti pada setiap tahapan penelitiannya. Jadi, model langkah analisis data kualitatif bukanlah teknik analisis data kualitatif melainkan sebuah strategi analisis data yang melekat pada setiap tahapan langkah penelitian kualitatif, sedangkan metode atau teknik

analisis kualitatif adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data (beberapa hanya untuk pengumpulan data saja) dan sekaligus juga adalah alat analisis data.

Bungin (2009:144) menjelaskan tahapan analisis induktif (kualitatif) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial, melakukan identifikasi, revisi-revisi dan pengecekan ulang terhadap data yang ada.
2. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh.
3. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi.
4. Menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi.
5. Menarik kesimpulan-kesimpulan umum.
6. Membangun atau menjelaskan variabel.

Instrumen penelitian atau alat untuk mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan) dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengamati proses kerja sama internal, kerja sama eksternal dan infrastruktur yang ada di lokasi penelitian yaitu Sentra Industri Tenun

ikat Kota Kediri. Proses kerja sama internal dan proses kerja sama eksternal dengan mengamati pelaku, input, proses, output, impact atau dampak kerja sama tersebut. Pengamatan infrastruktur dilakukan dengan mengamati fasilitas infrastruktur apa yang ada di lokasi sentra. Sedangkan wawancara digunakan dengan mewawancarai para pengrajin tenun ikat tentang bentuk kerja sama internal, bentuk kerja sama eksternal dan infrastruktur yang ada di lokasi sentra. Bentuk kerja sama internal dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama produksi, kerja sama pemasaran, kerja sama inovasi dan lain-lain. Bentuk kerja sama eksternal dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan lain-lain. Wawancara infrastruktur dilakukan dengan mewawancarai pengrajin tentang infrastruktur yang ada di lokasi sentra. Instrumen observasi menggunakan pedoman observasi sedangkan instrumen wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin Tenun Ikat di Sentra Industri Tenun Ikat Kota Kediri yang berjumlah 15 pengrajin dengan sampel penelitian berjumlah 10 pengrajin. Teknik sampling menggunakan purposive sampling atau pengambilan sampel dengan pertimbangan yaitu para pengrajin yang sudah melakukan kerja sama internal dan kerja sama eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sentra Industri Tenun Ikat Kota Kediri

Sentra Industri Tenun Ikat Kota Kediri berlokasi di Desa Bandar Kidul Kota Kediri berdiri sejak tahun 1946 dengan diawali oleh satu orang pengrajin dan satu alat yaitu Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Produk berupa sarung goyor dengan jumlah produksi dua buah sarung setiap harinya. Empat tahun kemudian berkembang menjadi tujuh ATBM dengan kapasitas produksi empat buah sarung per hari. Dari tahun ke tahun usaha ini semakin berkembang dengan puncaknya mempunyai 150 ATBM dengan kapasitas produksi 100 sarung setiap

harinya. Penjualan tidak hanya melayani pasar di wilayah Kediri tapi juga sampai pada Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Mojokerto, Jombang dan Nganjuk.

Penjualan tenun ikat mencapai masa kejayaan sekitar tahun 70 an dengan jumlah pengrajin mencapai 50 pengrajin dengan rata-rata mempunyai 40 sampai 50 ATBM dengan kapasitas produksi 30 buah sarung per hari per pengrajin. Tahun 1990 an seiring dengan berdirinya pabrik-pabrik besar yang memproduksi sarung dengan harga di bawah sarung tenun menyebabkan pejualan sarung tenun mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga banyak pengrajin yang gulung tikar dengan menyisakan jumlah pengrajin sekitar 30 an.

Tahun 2005 an para pengrajin yang masih bertahan dalam usaha menghadapi persaingan yang keras dengan sarung produksi pabrik melakukan inovasi dengan membuat kain tenun. Ternyata kain tenun ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat terbukti dengan jumlah permintaan yang semakin meningkat. Permintaan tidak hanya

berasal dari konsumen perorangan tapi dari instansi pemerintah, sekolah dan instansi swasta. Di Kediri kain tenun ikat sudah menjadi icon daerah dan digunakan untuk seragam dinas pemerintah daerah maupun sekolah. Kain tenun tidak hanya digunakan untuk baju tapi juga untuk sarung bantal dan sarung tas dan aneka produk kerajinan lainnya.

Dukungan dari berbagai pihak atas keberhasilan kain tenun ikat ini terus dilakukan seperti dari pemerintah kota bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM berupa kredit dengan bunga yang murah yaitu 4% dan berbagai lomba dengan memakai kain tenun. Dukungan lain berasal dari Dinas perindustrian dan perdagangan dalam bentuk fasilitasi pameran dan Bank Indonesia dalam bentuk pelatihan dan studi banding. Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk kredit modal kerja dan dengan Perguruan Tinggi dalam bentuk inovasi peralatan.

Hasil Penelitian

Dibawah ini disajikan tabel hasil penelitian mengenai bentuk kerja sama internal, kerja sama eksternal

dan dukungan infrastruktur di Sentra Industri Tenun Ikat Kota Kediri.

Tabel 1: Bentuk kerja sama internal, kerja sama eksternal dan infrastruktur di Sentra Industri Tenun Ikat Kota Kediri

	Kerja Sama Internal	Kerja Sama Eksternal	Infrastruktur
Bentuk kerja sama internal dan kerja sama eksternal	Joint Production	Bank-kredit investasi	
	Sub Produksi	Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-kredit modal kerja	
	Pengadaan bahan baku	Perguruan Tinggi-inovasi peralatan	
		Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi dan UMKM-kredit UMKM)	
		Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)-pameran	
		Bank Indonesia-pelatihan dan studi banding	
Infrastruktur			Kecukupan daya listrik
			Sarana transportasi
			Sarana Telekomunikasi
			Air bersih

Sumber: Data diolah

Pembahasan

Bentuk Kerja Sama Internal

Hasil penelitian menunjukkan bentuk kerja sama internal yang dilakukan adalah kerja sama produksi yaitu *joint production* atau produksi bersama, sub produksi dan pengadaan bahan baku. Kerja sama *joint production* terjadi saat seorang pengrajin tenun ikat mendapat pesanan dalam jumlah besar seperti dari Pemerintah daerah, sekolah, perusahaan dan tidak mampu melakukan produksi sendiri sehingga dibagi bersama dengan anggota sentra

yang lain. Kerja sama subproduksi terjadi saat seorang pengrajin tenun ikat men-sub kan produksinya ke pihak lain baik perorangan maupun kelompok. Kerja sama pengadaan bahan baku terjadi saat ada pesanan dalam jumlah besar sehingga memesan bahan baku bersama-sama. Pemesanan dalam jumlah besar ini dapat mengurangi biaya dan penyelesaian pemesanan biasanya dilakukan dalam waktu bersamaan.

Bentuk Kerja Sama Eksternal

Bentuk kerja sama eksternal dilakukan dengan Perbankan, Lembaga Keuangan Mikro, Perguruan Tinggi, Pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Kerja sama dengan perbankan dilakukan apabila pengrajin tenun ikat membutuhkan modal yang besar misalnya untuk investasi peralatan dan gedung. Kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan apabila membutuhkan modal kerja untuk memenuhi pesanan. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dilakukan untuk menginovasi peralatan (Alat Tenun Bukan Mesin-ATBM). Kerja sama dengan Pemerintah Daerah

dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam bentuk kredit dengan bunga yang rendah yaitu 4% dan dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan berupa fasilitasi pameran baik lokal, regional maupun nasional. Kerja sama dengan Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk fasilitasi studi banding dan pelatihan.

Infrastruktur

Dukungan infratraktur adalah kecukupan daya listrik, sarana transportasi, telekomunikasi dan sarana air bersih. Kecukupan daya listrik digunakan untuk pengadaan air bersih, penerangan ruang produksi, penerangan outlet/showroom, penghitung ukelan benang. Sarana transportasi digunakan untuk transportasi pengadaan bahan baku, pengiriman produk jadi dan akses konsumen ke sentra. Sarana telekomunikasi digunakan untuk komunikasi bisnis baik dengan pemasok bahan baku, pembeli maupun calon pembeli. Sarana air bersih digunakan pewarnaan saat proses produksi.

Proses Kerja Sama Internal

Kerja sama *joint production* atau produksi bersama dilakukan dengan proses sebagai berikut: 1) Pelaku adalah para pengrajin tenun ikat yang ada di dalam sentra. Salah satu atau beberapa pelaku mendapatkan order atau pesanan dalam jumlah besar baik dari Pemerintah Kota, sekolah atau instansi swasta untuk seragam. Karena keterbatasan kapasitas produksi maka order atau pesanan tersebut dibagi dengan pengrajin lain dalam satu sentra untuk diproduksi sesuai dengan kemampuan masing-masing yang penting dapat memenuhi jumlah order atau pesanan tersebut. 2) input atau masukan adalah order atau pesanan, desain produk, bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 3) proses adalah masing-masing pengrajin memproduksi sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan di muka. 4) Output adalah produk jadi. 5) Impact atau dampak adalah produk sesuai order atau pesanan, kualitas produk seragam dan meningkatkan penjualan.

Proses kerja sama sub produksi adalah: 1) Pelaku adalah para pengrajin tenun ikat di dalam sentra dan pengrajin tenun ikat di luar sentra.

Ke dua belak pihak menyepakati kerja sama produksi dengan jumlah dan waktu tertentu. 2) input atau masukan adalah jumlah produksi, bahan baku, biaya overhead pabrik. 3) proses adalah pengrajin di luar sentra memproduksi sesuai dengan jumlah, waktu dan kualitas yang telah ditentukan. 4) Output adalah produk jadi. 5) impact atau dampak dapat memenuhi order atau pesanan.

Proses kerja sama pengadaan bahan baku adalah sebagai berikut: 1) Pelaku adalah para pengrajin tenun ikat di dalam sentra dan pemasok bahan baku di luar sentra. 2) input adalah pesanan bahan baku dengan jumlah, waktu dan kualitas tertentu. 3) proses adalah para pengrajin tenun ikat memesan bersama-sama bahan baku dengan jumlah, waktu dan harga yang telah ditentukan dengan satu pemasok. Pemasok mengirim bahan baku ke sentra dengan jumlah, waktu dan harga seperti yang telah disepakati. Pemasok menerima pembayaran. 4) output adalah ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup sesuai jadwal produksi, kualitas terjamin dan harga bersaing. 5) impact atau dampak

adalah dapat memenuhi order atau pesanan tepat waktu.

Proses Kerja Sama Eksternal

Proses kerja sama eksternal dengan perbankan dalam bentuk pemberian kredit investasi untuk pengadaan tanah dan bangunan dilakukan sebagai berikut: 1) Input berupa pengajuan kredit ke perbankan dengan melengkapi berbagai macam persyaratan. 2) Proses dilakukan dengan pengrajin tenun ikat datang ke perbankan menyerahkan berbagai macam persyaratan untuk pengajuan kredit. Pihak perbankan menerima pengajuan kredit dari pengrajin dan diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan penilaian pengrajin menerima keputusan diterima atau ditolak pengajuan kreditnya. 3) Output berupa penerimaan atau penolakan pengajuan kredit dan pencairan. 4) Impact/dampak adalah penambahan dana investasi, penambahan tanah, bangunan dan mesin sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan.

Proses kerja sama eksternal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk pemberian kredit modal

kerja dilakukan sebagai berikut: 1) Input berupa pengajuan kredit ke LKM dengan melengkapi berbagai macam persyaratan. 2) Proses dilakukan dengan pengrajin tenun ikat datang ke LKM menyerahkan berbagai macam persyaratan untuk pengajuan kredit. Pihak LKM menerima pengajuan kredit dari pengrajin dan diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan penilaian pengrajin menerima keputusan diterima atau ditolak pengajuan kreditnya. 3) Output berupa penerimaan atau penolakan pengajuan kredit dan pencairan. 4) Impact/dampak adalah penambahan dana modal kerja sehingga dapat digunakan membiayai kebutuhan-kebutuhan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya listrik, pembayaran hutang jangka pendek dan lain-lain.

Proses kerja sama dengan perguruan tinggi berupa inovasi sebagian peralatan untuk mengukur ukelan benang (bukan ATBM) dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan penelitian atau praktek kerja lapangan dengan kegiatan sebagai berikut:1)

Input. Mahasiswa membawa desain/rancangan produk. 2) Proses. Desain/rancangan produk diujicoba beberapa kali sampai menjadi produk akhir yang siap digunakan. 3) Output berupa produk jadi. 4) Impact/dampaknya adalah dapat menghitung ukelan benang secara otomatis yang sebelumnya dihitung dengan manual serta meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.

Proses kerja sama dengan pemerintah daerah (Dinas Koperasi dan UMKM) berupa pemberian kredit dengan bunga yang rendah (4 %) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Input. Dinas Koperasi dan UMKM menawarkan kredit dengan bunga yang rendah (4 %). Pengrajin mengajukan kredit dengan melengkapi berbagai macam persyaratan. 2) Proses. Para pengrajin datang ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyerahkan berbagai macam persyaratan. Pengrajin menunggu pengumuman diterima atau ditolak pengajuan kreditnya dan pencairan dana apabila kreditnya disetujui. 3) Output berupa tambahan dana untuk modal kerja dan modal untuk investasi. 4) Impact/dampaknya

adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Proses kerja sama dengan pemerintah daerah (Dinas Perindustrian dan perdagangan berupa fasilitasi pameran baik tingkat lokal, regional maupun nasional dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Input. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menawarkan pameran yang dapat diikuti oleh perwakilan pengrajin dengan persyaratan yang telah ditentukan. 2) Proses. Para pengrajin memutuskan untuk mengikuti pameran atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan. Apabila diputuskan mengikuti pameran maka pengrajin akan melakukan persiapan seperti transportasi produk, akomodasi dan perlengkapan pameran lainnya. 3) Output berupa promosi dan penjualan produk. 4) Impact/dampaknya adalah produk semakin dikenal masyarakat luas dan peningkatan penjualan produk.

Proses kerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi studi banding dilakukan

dengan kegiatan sebagai berikut: 1) input. Bank Indonesia menawarkan pelatihan manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Bank Indonesia juga memfasilitasi studi banding dengan usaha sejenis yaitu sentra industri tenun ikat baik di dalam propinsi maupun luar propinsi. 2) Proses. Pengrajin tenun ikat menerima tawaran pelatihan atau studi banding dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pengrajin melaksanakan pelatihan dan studi banding dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan. 3) Outputnya adalah meningkatnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia. 4) Impact/dampaknya adalah kenaikan produktifitas, penjualan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Proses Dukungan Infrastruktur

Proses dukungan infrastruktur dalam bentuk kecukupan daya listrik, sarana transportasi, telekomunikasi dan sarana air bersih berasal dari pemerintah misalnya listrik dari PLN, sarana transportasi (jalan dan jembatan) dari dinas pekerjaan umum, telekomunikasi dari Telkom

atau operator lain dan air bersih dari PDAM atau air tanah. Pengrajin tenun ikat tinggal memanfaatkan saja, semakin layak dan memadai dukungan infrastruktur tersebut semakin meningkatkan kinerja usahanya.

KESIMPULAN

1. Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menetapkan sentra sebagai titik masuk (*entry point*). Pemberdayaan UMKM diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) dan penguatan (*strengthening*) kepada UMKM dalam bentuk sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas meningkat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya (kinerjanya).
2. Untuk mengembangkan sentra dapat dilakukan dengan pendekatan klaster.
3. Klaster adalah kerja sama internal antar pengrajin dalam satu sentra, kerja sama eksternal antara pengrajin dalam satu sentra dengan pihak luar sentra dan adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Klaster juga dapat didefinisikan sebagai sentra yang telah berkembang yang ditandai dengan adanya kerja sama internal, kerja sama eksternal dan adanya dukungan infrastuktur yang memadai.
4. Bentuk kerja sama internal adalah kerja sama produksi yaitu joint production atau produksi bersama, sub produksi dan pengadaan bahan baku. Kerja sama joint production saat mendapat pesanan dalam jumlah besar dan tidak mampu melakukan produksi sendiri sehingga dibagi bersama dengan anggota sentra yang lain. Kerja sama subproduksi saat men-subkan produksinya ke pihak lain. Kerja sama pengadaan bahan aku saat ada pesanan dalam jumlah besar sehingga memesan bahan baku bersama-sama.
5. Bentuk kerja sama eksternal dengan Perbankan, Lembaga Keuangan Mikro, Perguruan Tinggi, Pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Kerja sama

dengan perbankan saat membutuhkan modal untuk investasi. Kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro saat membutuhkan modal kerja. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi saat menginovasi peralatan (Alat Tenun Bukan Mesin-ATBM). Kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi dan UMKM) saat ada pameran baik lokal, regional maupun nasional. Kerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk fasilitasi studi banding dan pelatihan.

6. Dukungan infratraktur adalah kecukupan daya listrik, sarana transportasi, telekomunikasi dan sarana air bersih. Kecukupan daya listrik untuk pengadaan air bersih, penerangan ruang produksi. Sarana transportasi untuk transportasi pengadaan bahan baku, pengiriman produk jadi. Sarana telekomunikasi untuk komunikasi bisnis. Sarana air bersih untuk pewarnaan saat proses produksi.

SARAN

1. Para pengrajin tenun ikat di dalam sentra harus berupaya meningkatkan intensitas kerja sama internal, kerja sama eksternal dan dukungan infrastruktur.
2. Para stakeholder pengrajin tenun ikat harus berupaya meningkatkan sinergi antar pelaku pemberdayaan terutama pihak eksternal agar tidak tumpang tindih dalam memberikan pemberdayaan sehingga lebih efektif dan efisien.

DAFTAR RUJUKAN

- Bungin, B. 2009. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana.
- Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM bekerja sama dengan BPS. 2005. *Pengkajian Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Yang Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal*. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal pengkajian Koperasi dan UKM, (On line), nomor 2 Tahun 1-2006, tersedia: www.depkop.go.id, diunduh 10 Maret 2011.

- Lestari, S. 2006. *Kajian Efektivitas Model Penumbuhan Klaster Bisnis UKM Berbasis Agribisnis*. Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM. Jurnal pengkajian Koperasi dan UKM, (Online), nomor 2 Tahun 1-2006, tersedia: www.depkop.go.id, diunduh 24 Juli 2010.
- Mardikanto. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Acuan bagi Aparat Birokrasi, Praktisi dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Kerja sama Fakultas Pertanian UNS dengan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Soetrisno, N. 2009. *Pengembangan Klaster IKM/UKM di Indonesia: Pengalaman dan Prospek*. Disampaikan dalam International Conference & Workshop on Cluster Development, Solo, 27-28 November 2009.
- Taufik, T.A. 2012. *Definisi Klaster*. Asosiasi Klaster Indonesia. (Online), tersedia: klaster-industri.blogspot.com, diunduh 5 Januari 2013.
- Tambunan, T. 2006. *Development Of Small and Medium Scale Industry Clusters In Indonesia*. Kadin Indonesia-Jetro, (Online) www.kadin-indonesia.or.id, diunduh 15 Oktober 2010.
- , 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tiyanto, D., L. Kristianto., B. A. Catur., dan B. Hilmawanti. 2006. *Mengubah dari yang kecil (Perspektif, Konsepsi dan Metode Membangun Komunitas)*. Karanganyar: Lindu Pustaka.
- UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah-UMKM*. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.